



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURAHNO**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **162683**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/42 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/45 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/120 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 214.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET SPARK MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 522.500.001**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.837.900.001

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.837.900.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Adhianti**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **403712**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 185.782.000**

1. MOTOR, Yamaha 2SX - Soul GT 300 Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 19.782.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T GR SPORT Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 166.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 201.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 137.905.868**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 174.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.874.187.868**

III. HUTANG **Rp. 100.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.774.187.868**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.